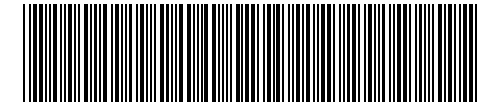




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400462/2017**



DS:2499-0664-8121-8284

Revisi ke 02

Tanggal : 28 November 2017

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (08) | SUMATERA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400462) | PENGADILAN NEGERI MUARO |
| Sebesar | : Rp. | 97.450.000 (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	97.450.000
Rp.	97.450.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	97.450.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN SIJUNJUNG | (077) Rp. | 97.450.000 |
|-------------------|-----------|------------|

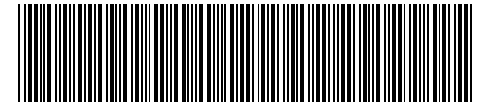
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2499-0664-8121-8284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

Kuasa Pengguna Anggaran : ERITASRIZAL, SH
Bendahara Pengeluaran : DINI OKTORINA, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : M. YATIM

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		97.450.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		97.450.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		97.450.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		97.450.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
Keluaran (Output)	1049.003	Pos Bantuan Hukum	240,00 Jam Layanan	24.000.000
	1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	90,00 Perkara	33.080.000
	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	128,00 Perkara	38.910.000
	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	2,00 Perkara	1.460.000

Direktur Jenderal Badilum

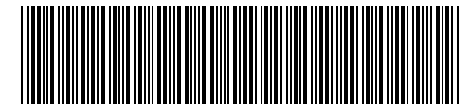
ttd.

Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017



DS:2499-0664-8121-8284

I B. SUMBER DANA

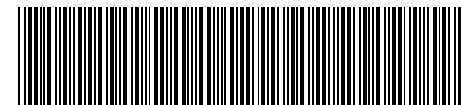
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
 Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

					Pagu			Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2017	Rp.	97.450.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	97.450.000		(2) RPLN	US\$		0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2499-0664-8121-8284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	-	97.450	-	-	-	97.450		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	97.450	-	-	-	97.450		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	97.450	-	-	-	97.450		
1049.003	Pos Bantuan Hukum	-	24.000	-	-	-	24.000	08 . 13	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	077	
1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	-	33.080	-	-	-	33.080	08 . 13	
01	RM	-	33.080	-	-	-	33.080	077	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	38.910	-	-	-	38.910	08 . 13	
01	RM	-	38.910	-	-	-	38.910	077	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	1.460	-	-	-	1.460	08 . 13	
01	RM	-	1.460	-	-	-	1.460	077	
JUMLAH		-	97.450	-	-	-	97.450		

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2499-0664-8121-8284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

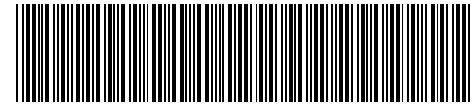
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400462	PENGADILAN NEGERI MUARO													
		RENCANA PENARIKAN DANA	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
		52 BELANJA BARANG	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
		52 BELANJA BARANG	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
		PERKIRAAN PENERIMAAN	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	132	1.639
		- PNB (423415)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	430
		- PNB (423419)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	98	1.209

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017
IV. C A T A T A N**



DS:2499-0664-8121-8284

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [400462] PENGADILAN NEGERI MUARO

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004